

**Kunci Jawaban  
Pendidikan Pancasila VIII**

**Bab 1**

**Subbab A–Uji Pemahaman**

**Bagian A**

1. A
2. C

**Bagian B**

Menurut pandangan Ketut Rindjin, terdapat tiga pengertian sekaligus tiga tingkatan yang dimiliki oleh Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

- a. Abstrak dan universal  
Makna abstrak tampak dari kata kunci tiap sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Awalan dan akhiran yang digunakan dalam kata-kata tersebut menegaskan sifat abstrak karena hanya dalam pikiran. Makna universal menunjukkan bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dapat berlaku dan dimiliki pula oleh bangsa lain di dunia.
- b. Umum dan kolektif  
Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal-organik antara Pancasila dan Pembukaan dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.
- c. Khusus dan konkret  
Melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, nilai-nilai Pancasila dijabarkan secara lebih konkret, khusus, dan operasional.

**Subbab B–Uji Pemahaman**

**Bagian A**

1. D
2. A

**Bagian B**

Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi ataupun dalam interaksi antarmanusia dalam masyarakat dan alam sekitarnya.
- b. Sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara, yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran sebagai berikut.

- a. Memungkinkan bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh dan mempunyai daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
- b. Menunjukkan arah untuk mencapai cita-cita bangsa yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- c. Menjadi pegangan dan pedoman dalam memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional.
- d. Menimbulkan semangat dan kemampuan bagi bangsa Indonesia untuk membangun dirinya.
- e. Menunjukkan gagasan-gagasan terkait wujud kehidupan yang dicita-citakan.
- f. Menimbulkan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

**Subbab C–Uji Pemahaman**

**Bagian A**

1. C
2. A

#### **Bagian B**

Implikasi kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai berikut.

- a. Sumber dari segala sumber hukum.
- b. Melekat pada kelangsungan hidup negara sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Bersifat imperatif.

Sebagai cita hukum, Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia, tetapi terletak di luar sistem norma hukum. Dalam kedudukan sebagai cita hukum, Pancasila memiliki fungsi konstitutif (fungsi menetapkan) dan regulatif (fungsi mengatur) terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum.

### **Subbab D—Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. A
2. A

#### **Bagian B**

Pancasila adalah kepribadian yang unik dan khas sehingga bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang berbeda dengan bangsa lain. Hal ini karena Pancasila digali dari bumi Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia sehingga tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Nilai dasar tiap sila bersifat universal dan dapat ditemukan serta dianut oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, dalam konteks bangsa Indonesia, kelima sila Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan lima nilai universal inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

### **Subbab E—Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. B
2. D

#### **Bagian B**

Setuju. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan berasal dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berpedoman pada nilai-nilai tersebut, menjadikan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat Indonesia sebagai nilai bersama yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Kelima nilai tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam implikasi di kehidupan bernegara.

### **Latihan Soal Akhir Bab**

#### **Bagian A**

1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
6. B
7. C
8. A
9. D
10. B

#### **Bagian B**

1. Menurut Notonagoro, sila-sila Pancasila mewujudkan dalam suatu bangunan hierarkis piramidal. Bersifat hierarkis menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila saling terkait karena yang terdahulu menjadi sumber nilai dan menjiwai sila berikutnya. Urutan tersebut tidak terpisah-pisah, tetapi saling mengikat. Ikatan ini membuat sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat. Sementara itu, dikatakan berbentuk piramidal, karena sila-sila Pancasila memiliki tingkatan seperti piramida. Kata piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan luas (secara kuantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (aspek kualitas).
2. Lima perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama adalah sebagai berikut.
  - a. Menjalankan perintah dari agama masing-masing.
  - b. Saling menghormati dan menghargai orang-orang dengan agama yang berbeda.
  - c. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman.
  - d. Mengamalkan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas yang dijalankan.
  - e. Toleransi dan membina kerukunan antarumat beragama.
3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menunjukkan bahwa seluruh hukum atau peraturan, mulai dari pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, dan seluruh peraturan pelaksana lainnya harus bersandar pada Pancasila sebagai landasan hukumnya dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
4. Ya. Pancasila digali dari bumi Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sama halnya, seperti kebudayaan yang terdapat dalam gambar yang menjadi ciri khas Indonesia. Sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia sehingga tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.
5. Salah satunya dengan menerapkan sikap pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang tergambar dalam sikap berikut.
  - a. Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia.
  - b. Berkebinekaan Global.
  - c. Gotong Royong.
  - d. Mandiri.
  - e. Bernalar Kritis.
  - f. Kreatif.

### Soal AKM

#### Soal 1

B. *ethos*

#### Soal 2

(1) Benar      (2) Benar      (3) Salah      (4) Salah

#### Soal 3

VI/MPR/2001

## **Bab 2**

### **Subbab A–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. A
2. C

#### **Bagian B**

Indonesia termasuk jenis negara kesatuan dengan sistem desentralisasi karena dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kekuasaan, disebut sebagai otonomi daerah. Negara Indonesia melaksanakan otonomi daerah berdasarkan amanat Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

### **Subbab B–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. A
2. A

#### **Bagian B**

Perbedaan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan, antara lain sebagai berikut.

- a. Bentuk negara merupakan batasan antara tinjauan secara yuridis dan sosiologis tentang negara. Bentuk negara menggambarkan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan dan struktur negara yang mencakup segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya.
- b. Bentuk pemerintahan secara khusus hanya menggambarkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan tanpa menyinggung struktur daerah ataupun bangsanya.

### **Subbab C–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. A
2. C

#### **Bagian B**

Konsep negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau “negara hukum Pancasila”. Konsep negara hukum Pancasila merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

### **Subbab D–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. C
2. A

#### **Bagian B**

Prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

- a. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik (Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut undang-undang dasar (Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- d. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, serta MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945).

- e. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945).
- f. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang (Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945).

### Latihan Soal Akhir Bab

#### Bagian A

1. A
2. D
3. C
4. B
5. A
6. A
7. D
8. C
9. A
10. A

#### Bagian B

1. Perbedaan pandangan antara Soekarno dan Mohammad Hatta terkait bentuk negara adalah sebagai berikut.
  - a. Soekarno menghendaki agar Indonesia berbentuk kesatuan. Menurutnya, negara yang berdasarkan persatuan akan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia.
  - b. Mohammad Hatta mengusulkan agar Indonesia sebaiknya menjadi negara federal atau serikat.
2. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatunya diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat. Daerah cukup melaksanakan segala yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sebagian urusan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerah bersangkutan. Daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
3. Tidak. Gambar pada soal menunjukkan peristiwa pemilihan umum yang terjadi pada negara dalam bentuk republik, yaitu bentuk pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Sedangkan, dalam monarki, suksesi kepala negara dilakukan secara turun menurun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, elemen negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut.
  - a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
  - b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
  - c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdamaian merupakan sarana terakhir.
  - d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945 tersebut menegaskan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Negara Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Indonesia menganut demokrasi tersebut karena sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

### Soal AKM

#### Soal 1

- (1) Akurat      (2) Tidak Akurat      (3) Akurat      (4) Akurat

#### Soal 2

C. parlemen Indonesia

#### Soal 3

Bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah republik. Bentuk republik merupakan bentuk pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum

dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia juga sebagai negara yang berkedaulatan rakyat yang berarti kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ketika menjalankan tugasnya, pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat.

### **Bab 3**

#### **Subbab A–Uji Pemahaman**

##### **Bagian A**

1. A
2. C

##### **Bagian B**

Dalam buku *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Badan Pengkajian MPR RI pada tahun 2017, dikatakan bahwa dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945, sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari *distribution of power* menjadi *separation of power*. Pemisahan kekuasaan bukan berarti bahwa lembaga yang satu tidak dapat berhubungan dengan lembaga lainnya. Mekanisme *checks and balances* memungkinkan masing-masing lembaga negara untuk saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.

#### **Subbab B–Uji Pemahaman**

##### **Bagian A**

1. B
2. A

##### **Bagian B**

Sebagai kepala negara, presiden memegang kekuasaan simbolis. Artinya, dalam diri seorang presiden, ada kekuasaan politik nyata dan kekuasaan politik simbolis yang menggambarkan kewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya.

#### **Subbab C–Uji Pemahaman**

##### **Bagian A**

1. B
2. C

##### **Bagian B**

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

#### **Subbab D–Uji Pemahaman**

##### **Bagian A**

1. D
2. D

##### **Bagian B**

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

#### **Latihan Soal Akhir Bab**

##### **Bagian A**

1. A
2. A
3. C
4. B
5. B
6. A

7. A
8. C
9. A
10. B

#### Bagian B

1. Bertumpu pada trias politika, suprastruktur politik di Indonesia terdiri atas tiga kekuasaan sebagaimana tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu kekuasaan eksekutif (Presiden dan para menteri), kekuasaan legislative (MPR, DPR, dan DPD), dan kekuasaan yudikatif (MA, MK, dan KY). Selain itu, kekuasaan politik di Indonesia dikaji lebih mendalam ditemukan alat kelengkapan negara di luar ketiga lembaga tersebut, yaitu lembaga eksaminatif atau inspektif yang dilaksanakan oleh BPK.
2. Pada umumnya, ada dua sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
  - a. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan.
  - b. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden hanya menjadi kepala negara, sementara pihak yang berwenang untuk menjalankan pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.
3. Perubahan baru sesudah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen adalah sebagai berikut.
  - a. Pemilihan presiden secara langsung.
  - b. Mekanisme *checks and balances*.
  - c. Pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.
4. Gambar menunjukkan usaha kerajinan tangan warga lokal, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren berupa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
5. Saat ini terdapat dua wilayah yang diberi status sebagai daerah istimewa di Indonesia. Kedua wilayah tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Daerah istimewa tersebut berkaitan dengan *Zelfbesturende landschappen* (daerah swapraja). Pada zaman kolonial Belanda, *zelfbesturende landschappen* adalah daerah swapraja atau kerajaan-kerajaan pribumi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat masing-masing. Umumnya, daerah swapraja tersebut berbentuk kerajaan/kesultanan dengan raja atau sultan menjadi penentu segalanya.

#### Soal AKM

##### Soal 1

- (1) C                      (2) B                      (3) E                      (4) A

##### Soal 2

- (1) Tidak Akurat              (2) Akurat              (3) Akurat              (4) Tidak Akurat

##### Soal 3

Pemisahan kekuasaan dalam negara sangat penting agar tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari masing-masing lembaga serta menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang saja dan risiko sistem pemerintahan absolut atau otoriter.

## Uji Capaian Pembelajaran 1

### Bagian A

1. B
2. A
3. A
4. B
5. C
6. D
7. D
8. B
9. B
10. C
11. C
12. D
13. A
14. B
15. A
16. A
17. B
18. D
19. D
20. C

### Bagian B

1. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang Pancasila di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai) atau BPUPK. Dalam pidatonya, Soekarno menggunakan istilah *philosophische grondslag* untuk menyebut makna dasar negara yang ia usulkan. Istilah tersebut ia jelaskan sebagai “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal abadi”.
2. Corak dan watak yang dimiliki masyarakat Indonesia, antara lain bangsa yang religius, menghormati bangsa dan manusia lain, adanya persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta keadilan sosial. Nilai-nilai dasar ini dirumuskan menjadi nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila disebut sebagai jati diri bangsa.
3. Ya, pengamalan dalam hukum yang menghargai hak asasi manusia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memiliki makna yuridis, yaitu bahwa Pancasila melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dan hukum-hukum tersebut bersumber darinya. Dengan kata lain, di Negara Indonesia, hukum harus bersandar pada kekuasaan Tuhan, hukum harus menghargai hak asasi manusia, hukum harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, hukum dihasilkan oleh sistem politik yang demokratis, dan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan sosial.
4. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pernyataan tersebut, yakni kata ‘kesatuan’ dan ‘republik’. Kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Kata ‘kesatuan’ mengacu pada bentuk negara. Sementara itu, ‘republik’ mengacu pada bentuk pemerintahan. Bentuk negara menggambarkan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan. Bentuk pemerintahan secara khusus hanya menggambarkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan.
5. Menurut Philipus M. Hadjon, elemen negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut.
  - a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
  - b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
  - c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.

- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, kedaulatan tertinggi Negara Indonesia berada di tangan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ketika menjalankan tugasnya, pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945 tersebut menegaskan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Negara Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila.
7. Perbedaan konsep trias politika yang disampaikan oleh John Locke dan Montesquieu adalah sebagai berikut.
- a. Trias politika diprakarsai oleh John Locke menyampaikan gagasan tentang tiga fungsi kekuasaan negara yang terpisah adalah sebagai berikut.
- Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.
  - Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang.
  - Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melakukan perserikatan, aliansi, dan segala kegiatan dengan pemerintah luar negeri.
- b. Trias politika menurut Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu sebagai berikut.
- Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
  - Kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
  - Kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
8. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950), Indonesia menganut sistem parlementer semu (*quasi parlementer*). Sistem presidensial kemudian kembali dilaksanakan di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga saat ini.
9. Ya, kegiatan di kantor pajak daerah merupakan bentuk urusan pemerintahan di daerah. Kegiatan pajak daerah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota dan kegunaannya untuk pembiayaan pembangunan daerah tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada asas otonomi daerah.
10. Pendapat Soepomo tentang daerah istimewa adalah sebagai berikut.  
Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, *kooti-kooti, sultanat-sultanat* tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara; jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah "*zelfbesturende landschappen*, itu bukan negara sebab hanya ada satu negara. Jadi, *zelfbesturende landschappen*, bukan hanya daerah, tetapi daerah istimewa, yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli.

## Soal AKM

### Soal 1

- Perdebatan bagaimana Maryam dimakamkan oleh Fara, Adi, dan Aryo yang berhasil diselesaikan dengan damai adalah cerminan nilai sila pertama.
- Adi menyaksikan peristiwa *bullying* dan berusaha menolong meskipun harus menghadapi teman sekolah yang kerap mem-*bully*-nya juga adalah wujud penegakan sila kedua.
- Aryo sebagai pemimpin keluarga yang selalu menyelesaikan permasalahan keluarga dengan bermusyawarah dengan anggota keluarga merupakan perwujudan sila keempat.
- Ijah yang pulang kampung untuk memperjuangkan nasib keluarganya dan menuntut keadilan yang sulit didapatkan rakyat kecil adalah cerminan sila kelima.

### Soal 2

- (1) Akurat      (2) Akurat      (3) Akurat      (4) Tidak Akurat

### Soal 3

Film dalam stimulus diberi judul LIMA karena cerita yang diangkat mencerminkan kelima sila Pancasila. Alur ceritanya dibuat berbeda dengan mengambil ide tiap sila dalam Pancasila, tetapi tetap memiliki kesinambungan dan benang merah. Diharapkan, nilai-nilai Pancasila yang divisualkan ke dalam film dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **Bab 4**

### **Subbab A–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. B
2. D

#### **Bagian B**

Isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut.

- a. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
- b. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
- c. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

### **Subbab B–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. B
2. D

#### **Bagian B**

Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda memperlihatkan sikap kebangsaan atau nasionalisme yang berada di atas kepentingan lain. Nasionalisme tersebut tumbuh karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan sehingga timbul sikap untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kesadaran akan persatuan tentunya memperkuat nasionalisme. Sebaliknya, rasa nasionalisme menguatkan persatuan. Nilai persatuan dan kesatuan tidak dapat dipisahkan dari nasionalisme.

### **Subbab C–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. A
2. D

#### **Bagian B**

Sumpah Pemuda menjadi tonggak bangkitnya pemuda sekaligus menempatkan para pemuda sebagai entitas penting serta menunjukkan jati diri sebagai sebuah bangsa. Di era Reformasi, peran pemuda sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam segala aspek pembangunan nasional, menurut Pasal 16 UU RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda diharapkan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan.

### **Latihan Soal Akhir Bab**

#### **Bagian A**

1. A
2. A
3. C
4. B
5. D
6. B
7. A
8. B
9. B
10. C

#### **Bagian B**

1. Lahirnya kebangkitan nasional tidak dapat dipisahkan dari eksploitasi yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda terhadap masyarakat di Nusantara. Salah satu ontoh kebijakan

yang mengeksploitasi masyarakat Nusantara adalah kebijakan pintu terbuka. Praktik kebijakan pintu terbuka sangat eksploitatif sehingga memicu kritik dan desakan dari para humanis agar pemerintah Belanda memperbaiki nasib rakyat Hindia Belanda. Kritik dan desakan ini melahirkan politik etis. Kebijakan politik etis telah memicu lahirnya kesadaran kebangsaan.

2. Tujuan diadakannya Kongres Pemuda Pertama adalah mendorong para pemuda untuk mengejar persatuan yang lebih luas. Kongres ini membahas beberapa topik, di antaranya adalah topik yang terkait dengan perlunya persatuan Indonesia, kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia.
3. Ikrar para pemuda Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap organisasi dan pergerakan pemuda di Indonesia. Fusi antarorganisasi pemuda menjadi isu besar setelah terselenggaranya Kongres Pemuda Kedua. Hal ini tentunya merupakan konsekuensi logis dari cita-cita persatuan Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda.
4. Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:
  - a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
  - b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
  - e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
  - g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
5. Bila di lingkungan tempat tinggal terjadi musibah gempa bumi atau kebakaran yang menyebabkan sebagian rumah warga mengalami kerusakan, maka yang dapat dilakukan oleh seorang siswa adalah melakukan gotong royong untuk membantu warga. Contoh gotong royong yang dapat dilakukan dengan membantu membersihkan dan merapikan kerusakan yang terjadi dan melakukan penggalangan dana.

### **Soal AKM**

#### **Soal 1**

B. bonus demografi

#### **Soal 2**

(1) Tidak Sesuai      (2) Sesuai      (3) Tidak Sesuai (4) Sesuai

#### **Soal 3**

(1) E. *Learning to live together*

(2) A. *Learning to do*

(3) C. *Learning to know*

(4) B. *Learning to be*

## **Bab 5**

### **Subbab A—Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. A
2. D

#### **Bagian B**

Budaya nasional dihasilkan oleh masyarakat bangsa sejak zaman dahulu. Kebudayaan tersebut merupakan suatu karya yang dibanggakan. Kebudayaan tersebut memiliki kekhasan tersendiri. Dengan sifatnya yang khas, kebudayaan nasional menunjukkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

### **Subbab B—Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. D
2. C

#### **Bagian B**

Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara-cara berikut.

- a. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan.
- b. Menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan.
- d. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan.
- e. Mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

### **Subbab C—Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. A
2. B

#### **Bagian B**

Keragaman kebudayaan nasional di Indonesia memiliki manfaat sebagai alat pemersatu bangsa, karena melalui kebudayaan nasional Indonesia merefleksikan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sebagai contoh, bahasa Indonesia mempersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Kebudayaan nasional sebagai alat pemersatu bangsa memberikan manfaat sebagai identitas nasional dalam dunia internasional serta menumbuhkan sikap toleransi dan nasionalisme.

### **Subbab D—Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. B
2. C

#### **Bagian B**

Ya, karena tidak semua nilai-nilai dalam budaya global sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kita perlu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa yang terserap. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap berpedoman pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Kemampuan yang selektif dalam menerima kebudayaan global juga dapat dilakukan dengan mengembangkan kebudayaan nasional.

### **Latihan Soal Akhir Bab**

**Bagian A**

1. B
2. A
3. A
4. D
5. A
6. A
7. C
8. A
9. C
10. B

**Bagian B**

1. Untuk melestarikan budaya daerah, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan, di antaranya sebagai berikut.
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya daerah.
  - b. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya daerah beserta pemberdayaan dan pelestariannya.
  - c. Melakukan usaha untuk menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahmatan, dan solidaritas yang tinggi.
  - d. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah dan mampu mengelola keberagaman budaya daerah.
2. Ya, kegiatan digambar menunjukkan seseorang sedang membatik kain secara tradisional. Salah satu contoh strategi untuk melestarikan budaya daerah, yaitu memaksimalkan potensi daerah dan memberdayakan warga dengan menciptakan usaha lokal seperti batik, kain tenun, serta bentuk kerajinan lainnya.
3. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mempelajari budaya lokal;
  - b. melihat pertunjukkan atau pentas budaya daerah lain;
  - c. ikut serta dalam kegiatan atau perlombaan seni di daerah sekitar; dan
  - d. memperkenalkan budaya lokal dalam kegiatan internasional.
4. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak kebudayaan daerah. Pandangan ini memungkinkan paham kesatuan makin dimantapkan sehingga semangat ketunggalikaan dalam kebinekaan makin lebih dirasakan. Salah satu wujud pemahaman tersebut adalah negara kesatuan.
5. Ketahanan budaya dapat ditingkatkan dengan pemajuan kebudayaan yang berpedoman pada strategi kebudayaan. Dalam menghadapi masalah ini, salah satu metode utama yang dapat dilakukan adalah mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional, yang dilaksanakan melalui proses sebagai berikut.
  - a. Memfasilitasi pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional.
  - b. Peningkatan dan penguatan diplomasi budaya Indonesia.

**Soal AKM****Soal 1**

- (1) Salah      (2) Salah      (3) Benar      (4) Benar

**Soal 2**

- A. menunjukkan peradaban suatu bangsa, menjadi kekuatan penggerak, dan modal dasar bagi pembangunan

**Soal 3**

UNESCO

## **Bab 6**

### **Subbab A–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. B
2. C

#### **Bagian B**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi konten informasi yang bermuatan negatif dan tersebar di dunia maya, seperti hoaks dan ujaran kebencian, adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi digital. Literasi digital secara sederhana dapat dipahami sebagai cara seorang individu menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan media digital secara positif dan kreatif. Pemanfaatan media digital secara positif dan kreatif dapat dicapai apabila tiap pengguna dapat mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang hendak dilakukan sehingga dapat menghindari terjadinya konflik atau perpecahan dikemudian hari.

### **Subbab B–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. A
2. B

#### **Bagian B**

Netiket yang perlu diperhatikan secara umum, antara lain sebagai berikut.

- a. Jangan menyalin karya orang lain dan menunjukkannya sebagai milikmu. Ketika kamu menyalin sesuatu dari seseorang, mintalah izin terlebih dahulu dan hargailah hak ciptanya.
- b. Jangan menyebarkan informasi yang tidak berguna di internet dengan mengirimkan atau menanggapi postingan massal, seperti surat berantai dan rumor.
- c. Jangan membaca dan membagikan informasi orang lain, seperti id email, foto, dan nomor telepon mereka.
- d. Bersikap sopan saat berkomunikasi online. Jangan sertakan komentar yang menghina dalam komunikasimu.

### **Subbab C–Uji Pemahaman**

#### **Bagian A**

1. C
2. A

#### **Bagian B**

Literasi digital berperan bagi kemajuan suatu bangsa terlihat dalam aspek pembangunan ekonomi. Makin besar jumlah penduduk dengan literasi digital yang tinggi, makin cepat laju inovasi pengetahuan dan difusi teknologi. Dengan ini, sumber daya manusia mendorong pertumbuhan produktivitas ekonomi digital secara lebih jelas. Dalam pembangunan ekonomi, ekonomi digital mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan produktivitas industri yang ada, menumbuhkan pasar dan industri baru, serta mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

### **Latihan Soal Akhir Bab**

#### **Bagian A**

1. C
2. D
3. B
4. B
5. B

6. B
7. A
8. A
9. B
10. B

### Bagian B

1. Dampak positif dan negatif internet adalah sebagai berikut.
  - a. Dampak positif
    - Pengguna internet dapat saling berkomunikasi dan melakukan pertukaran data dengan cepat dan murah dari seluruh belahan dunia.
    - Pengguna internet dapat memperoleh informasi atau data dengan lebih cepat secara real-time dan akurat.
  - b. Dampak negatif
    - Membuka potensi terjadinya *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. *Cybercrime* merupakan penyalahgunaan teknologi internet untuk sebuah tindak kejahatan.
    - Membuka potensi untuk memperoleh informasi yang salah dan penggunaan konten ilegal.
2. Dengan adanya hoaks dan ujaran kebencian, akan berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/ atau konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal tersebut nantinya akan berdampak langsung pada rusaknya rasa persatuan dan kesatuan antarmasyarakat.
3. Kritis dalam menyikapi konten, terkait dengan keterampilan untuk mengevaluasi (*evaluating*), menandai (*tagging*), dan mengelola (*curating*) sumber informasi yang datang kepada kita dan memahaminya pada tingkat yang relatif dalam dan kritis. Bertanggung jawab secara sosial, terkait dengan partisipasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab warga masyarakat. Dua elemen tersebut mendorong terciptanya literasi digital yang baik. Kemampuan literasi digital akan meminimalisir dampak negatif dari penggunaan internet yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Tiga perilaku yang dapat menunjukkan sikap menjaga kehormatan diri di internet, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berkomunikasi secara *online*, tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya, dan tidak mempublikasikan konten atau informasi yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
5. Sebagai seorang siswa yang dapat dilakukan untuk mendukung program *Making Indonesia 4.0* adalah dengan mengembangkan kemampuan digital dan literasi digital dengan baik. Kemampuan digital dan literasi digital akan mengembangkan pola berpikir kritis dan tidak mudah tergerus dalam pengaruh yang negatif yang disebabkan oleh perkembangan digital.

### Soal AKM

#### Soal 1

A. 2,1 juta orang

#### Soal 2

(1) Benar      (2) Benar      (3) Salah      (4) Benar

#### Soal 3

Terdapat tiga etika dasar dalam melakukan bisnis dengan pemasaran digital. Pertama, hindari membuat berita atau informasi hoaks. Kedua, jangan membuat konten yang melanggar UU ITE. Ketiga, tidak boleh melakukan plagiasi.

## Uji Capaian Pembelajaran 2

### Bagian A

1. A
2. A
3. A
4. D
5. B
6. D
7. C
8. A
9. B
10. B
11. D
12. B
13. D
14. B
15. B
16. C
17. B
18. D
19. C
20. C

### Bagian B

1. Hal yang dapat diteladani dari para tokoh pendiri Budi Utomo, yaitu dengan menerapkan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan, semangat pantang menyerah dan nasionalisme, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
2. Tindakan yang dapat dilakukan sebagai penerapan ikrar Sumpah Pemuda adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, menghormati perbedaan yang ada dalam lingkungan pertemanan ataupun masyarakat, menerapkan sikap toleransi umat beragama, ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan, dan ikut serta dalam melestarikan kebudayaan nasional.
3. Lima hal yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut.
  - a. Berteman dengan siapa pun tanpa memandang latar belakang suku, ras, dan agama.
  - b. Ikut serta dalam pelaksanaan upacara dalam rangka merayakan hari-hari besar nasional.
  - c. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - d. Mempelajari dan ikut serta dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan nasional.
  - e. Saling bergotong royong membantu teman yang mengalami kesulitan.
4. Dalam pandangan Koentjaraningrat, kebudayaan daerah dapat diangkat menjadi kebudayaan nasional jika kebudayaan tersebut memenuhi syarat-syarat berikut.
  - a. Harus memberikan identitas bagi warga negara pendukung kebudayaan itu. Maksudnya, unsur kebudayaan daerah yang dapat diangkat menjadi unsur kebudayaan nasional adalah unsur kebudayaan daerah yang memiliki dan memberikan identitas dan ciri khas.
  - b. Harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya. Maksudnya, unsur kebudayaan daerah dapat menimbulkan perasaan bangga, baik bagi suku bangsa asal ataupun bagi rakyat Indonesia.
  - c. Harus bermutu tinggi. Maksudnya, unsur kebudayaan daerah mempunyai mutu yang tinggi agar dapat memperkaya khazanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

5. Ya, kegiatan pada gambar menunjukkan salah satu peran aktif pemuda sebagai agen perubahan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat melalui lingkungan hidup. Penanaman tanaman hijau di lingkungan sebagai bagian dari budaya bangsa merupakan salah satu langkah strategis dalam proses pembangunan nasional.
6. Ekspresi budaya tradisional sebagai kebudayaan nasional menjadi strategi untuk membuat budaya nasional menjadi identitas bangsa. Ketika ada pengakuan budaya Indonesia oleh negara lain, strategi kebudayaan nasional menjadikan ekspresi budaya tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia yang diwakili penguasaannya oleh negara. Ekspresi budaya tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.
  - a. Ekspresi budaya tradisional yang ada menjadi penanda dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
  - b. Cerminan kondisi bangsa yang menunjukkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa.
  - c. Memperlihatkan perbedaan yang khas dengan ekspresi budaya tradisional dari bangsa-bangsa lain di dunia.
7. Warisan budaya berwujud (*tangible*) atau warisan budaya bendawi adalah warisan budaya yang dapat disimpan dan disentuh secara fisik. Contohnya, peralatan dan pakaian tradisional serta artefak. Sementara itu, warisan budaya yang tidak berwujud (*intangible*) atau warisan budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, atau keterampilan yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, maupun perorangan sebagai bagian warisan budaya mereka.
8. Ya, mempelajari dan ikut serta dalam melakukan kebudayaan daerah atau lokal merupakan salah satu bentuk ketahanan budaya untuk menghadapi tantangan globalisasi. Budaya lokal yang menjadi unsur pembentuk budaya nasional dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Kebudayaan nasional yang dibentuk oleh bermacam-macam kearifan lokal, yang berakar pada budaya tiap daerah, akan turut menjaga ketahanan dan ketangguhan bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Hal tersebut dapat membentengi kita dari tantangan globalisasi yang dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Memelihara semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam era digital dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Meningkatkan kemampuan literasi digital dalam menggunakan media sosial yang mencakup *digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety*.
  - b. Selalu menerapkan etika berinternet dalam melakukan komunikasi dalam ruang digital.
  - c. Mengikuti perkembangan dunia digital secara baik, produktif, dan sesuai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara.
  - d. Memanfaatkan internet dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
10. Terjadinya revolusi Industri 4.0 apabila transformasi digital telah tercipta secara menyeluruh dalam aktivitas industri. Transformasi digital tercapai ketika pemanfaatan digital yang telah dikembangkan memungkinkan inovasi dan kreativitas, serta mendorong perubahan signifikan dalam domain profesional atau pengetahuan, baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks sosial. Saat ini pemerintah berupaya mendukung percepatan transformasi digital diharapkan dapat mempersiapkan masyarakat Indonesia Menyongsong era Revolusi Industri 4.0, salah satunya dengan cara Program Literasi Digital Nasional.  
Contoh tranformasi digital mendorong terjadinya revolusi industri 4.0 adalah pelayanan ojek secara *online* menggunakan aplikasi dan munculnya berbagai e-wallet sebagai bentuk pembayaran secara *online*.

### Soal AKM

#### Soal 1

- (1) Tidak Sesuai      (2) Tidak Sesuai      (3) Sesuai      (4) Sesuai

#### Soal 2

- (1) A. Masyarakat 1.0

- (2) B. Masyarakat 2.0
- (3) C. Masyarakat 3.0
- (4) D. Masyarakat 4.0

**Soal 3**

Masyarakat 5.0 dinyatakan sebagai tahap perkembangan kelima masyarakat manusia setelah masyarakat pemburu/pengumpul, pertanian, industri, dan informasi. Masyarakat 5.0 merupakan tahapan ketika manusia memasuki era *super smart society*. Masyarakat 5.0 telah menggunakan teknologi IT yang canggih, *internet of things*, robot, kecerdasan buatan, dan *augmented reality* digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai aktivitas lainnya agar orang dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi dengan nyaman.